

Bab I

PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang dari topik penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan-batasan, serta potensi manfaat dari penelitian.

I.1 Latar Belakang

Dengan adanya pertumbuhan teknologi yang semakin pesat membuat pemerintah di seluruh dunia berbondong-bondong dalam memanfaatkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau E-Government. E-government adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki atau dioperasikan oleh pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan penyampaian layanan, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi dan efisiensi (Ndou, 2004). Pada tahun 2020, United Nations (UN) E-Government Survey memberikan peringkat EGDI (E-Government Development Index) kepada Indonesia di peringkat 88 yang telah berhasil memasuki peringkat 100 besar dari 193 negara di dunia (United Nations, 2020). Peringkat ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang meningkat jika dibandingkan dengan peringkat EGDI yang diberikan pada tahun 2018 dimana Indonesia berada di urutan ke-107 (United Nations, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, tentunya pemerintah Indonesia akan terus memantau untuk menilai dan mengukur kematangan implementasi SPBE dari segi tahapan kapabilitas proses maupun fungsi indeks agar dapat menunjang pemerintahan digital serta pembangunan jangka Panjang dalam memenangkan persaingan global. Tidak hanya itu, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel, dan andal, membutuhkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional (Pemerintah Indonesia, 2020).

Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No.59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Metode penilaian dan tahapan proses juga diatur dalam regulasi tersebut.

Dijelaskan, pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertara pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Nilai Indeks SPBE

| No. | Nilai Indeks | Predikat |
|-----|--------------|-------------|
| 1. | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2. | 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik |
| 3. | 2,6 - < 3.5 | Baik |
| 4. | 1,8 - < 2,6 | Cukup |
| 5. | < 1,8 | Kurang |

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui masih terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, karena indeks SPBE instansi pusat pada tahun 2021 dengan nilai rata-rata 2,55 mendapat predikat Cukup. Sedangkan indeks SPBE Pemerintahan Daerah tahun 2021 mendapatkan nilai 2,18 dengan predikat Cukup.

Di setiap instansi pemerintah mempunyai indeks atau penilaian masing-masing, agar dapat terlihat perkembangan dari SPBE itu sendiri. Di tahun 2020, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemen PANRB) Nomor 153 tahun 2020 tentang hasil evaluasi SPBE pada 128 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah, Sumedang mendapatkan peringkat Sangat Baik dan menjadi urutan pertama se-Indonesia yang meraih predikat tertinggi yaitu dengan indeks SPBE 3,81. Indeks SPBE Sumedang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,51 atau kategori Cukup.

Namun sampai saat ini arsitektur data dan informasi di Kabupaten Sumedang belum tersedia karena masih dalam proses pembuatan, seperti tidak adanya Domain Arsitektur Data dan Informasi yang sesuai dengan metadata Surat Edaran Menteri PANRB no 18 tahun 2022. Akibat dari belum adanya dokumen domain data dan informasi yang tegas maka efisiensi SPBE menjadi rendah. Hal ini diakibatkan oleh proses pengadaan dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbeda diantara unit/dinas yang ada. Yang menarik, walaupun arsitektur data dan

informasi masih dalam tahapan pembuatan, Kabupaten Sumedang memiliki kepemimpinan digital yang kuat sehingga pengelolaan SPBE di Kabupaten Sumedang secara operasional dapat dikawal dengan baik. DISKOMINFOSANDITIK sebagai pengelola aset TIK sudah berperan dalam menentukan standar acuan bagi unit/dinas lainnya.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah ini dibuat untuk mengkaji inti permasalahan berdasarkan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini yaitu bagaimana rancangan model arsitektur pada domain data arsitektur di dalam lingkungan DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang untuk dapat digambarkan berdasarkan Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rancangan model yang dibuat akan menggambarkan solusi mengenai rancangan *Enterprise Architecture* yang akan membantu memenuhi proses integrasi arsitektur data.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan menghasilkan model *blueprint* yang berupa artefak serta usulan Arsitektur Data yang sesuai dengan dokumen Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sehingga dapat mencapai perancangan acuan Arsitektur Enterprise SPBE pada domain data pada DISKOMINFOSANDITIK yang sesuai dengan prinsip SPBE.

Dari hasil penelitian yang memiliki tujuan seperti yang sudah dijabarkan diatas, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak DISKOMINFOSANDITIK yang digunakan sebagai acuan standar dalam pengembangan *Enterprise Architecture* yang mendukung SPBE khususnya pada domain data dan informasi.

I.4 Batasan Penelitian

Adapun batasan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu perancangan Domain Data dan Informasi ini dibuat berdasarkan proses bisnis yang dipetakan dengan berfokus pada proyek RPJMD 2019-2023, kemudian akan dipetakan berdasarkan kesesuaian proses bisnis lintas fungsi yang dimana DISKOMINFOSANDITIK menjadi *leading sector* pada proses bisnis tersebut. Kemudian perancangan ini juga merujuk ke dokumen Peraturan Menteri Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Penulis juga menggunakan konsep *Enterprise Architecture* menggunakan pendekatan kerangka kerja TOGAF sebagai *best practice* penyusunan artefak, yang kemudian akan dibantu oleh pendekatan kerangka kerja DAMA DMBOK V.2 sebagai usulan perancangan SPBE.

I.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan manfaat yang didapat yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa usulan *Enterprise Architecture* terhadap domain data arsitektur sebagai target untuk mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan agar sesuai dengan visi misi dan tujuan implementasi SPBE yang ada pada DISKOMINFOSANDITIK, dengan begitu perancangan SPBE yang dilakukan oleh DISKOMINFOSANDITIK dapat memiliki standar acuan.

Kemudian penelitian ini juga membantu merancang dan menghasilkan model *blueprint* yang berupa artefak serta usulan Arsitektur Data yang sesuai dengan dokumen Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Bappenas No.16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sehingga dapat mencapai perancangan acuan Arsitektur Enterprise SPBE pada domain data pada DISKOMINFOSANDITIK yang sesuai dengan prinsip SPBE.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa perlu dibuatnya perancangan *enterprise architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan domain data arsitektur pada objek yang diteliti, kemudian perumusan masalah berdasarkan latar belakang dari objek yang diteliti, lalu bagaimana tujuan penelitian dari masalah yang ada, kemudian ditentukannya batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan literatur yang sesuai dengan topik penelitian yang dijadikan dasar pengetahuan dalam penyusunan tugas akhir, serta pada bab ini dijelaskan pula mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan maupun referensi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi model konseptual dan tahap-tahap pada sistematika penelitian yang akan dilakukan sebagai proses dalam menyelesaikan tugas akhir.

BAB IV PERSIAPAN DAN IDENTIFIKASI

Bab ini berisi tahap persiapan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, ruang lingkup, kebutuhan data, dan metode pengumpulan data, serta berisi tahap identifikasi yang meliputi identifikasi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.

BAB V ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi analisis dan perancangan enterprise architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang dengan kombinasi menggunakan artefak pada TOGAF ADM.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan serta saran yang diberikan organisasi dan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.